SKRIPSI

FUNGSI PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADAT DI DESA BOTUH BOSI KECAMATAN SIMPANG HULU KABUPATEN KETAPANG

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Oleh :

Stevania Samonta

NIM. E1031201046

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2025

SKRIPSI

FUNGSI PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADAT DI DESA BOTUH BOSI KECAMATAN SIMPANG HULU KABUPATEN KETAPANG

Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Oleh

Stevania Samonta

Nim. E1031201046

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2025

Lembar Persetujuan

Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Adat di Desa Botuh Bosi Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

Stevania Samonta
NIM. E1031201046

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

Dr. Pardi, S.Sos., M.A.B
NIP. 197209052002121003

Tanggal : 6-8-2025

Dosen Pembimbing Pendamping

Bima Sujendra, S.IP, M.Si
NIP. 198805072014041002

Tanggal : 28/07/2025

Dipindai dengan CamScanner

HALAMAN PENGESAHAN

FUNGSI PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADAT DI DESA BOTUH BOSI KECAMATAN SIMPANG HULU KABUPATEN KETAPANG

Oleh :

STEVANIA SAMONTA
NIM.E1031201046

Dipertahankan di : Pontianak
Pada Hari/Tanggal : Selasa/16 September 2025
Waktu : 09.00 WIB
Tempat : Ruang 6

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Dr. Pardi, S.Sos, M.AB	Bima Sujendra, S.IP, M.Si
NIP. 197209052002121003	NIP. 198805072014041002
Penguji Utama	Penguji Pendamping
Dr. Yulius Yohanes, M.Si	Rasidar, SE, M.Si
NIP. 196405271992021001	NIP.196808252007012001

Disahkan Oleh
Dekan Fisip Untan

Dr. Herlan, S.Sos, M.Si
NIP. 197205212006041001

ABSTRAK

Stevania Samonta, E1031201046 : **Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Adat Di Desa Botuh Bosi Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang.** Skripsi. Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura . Pontianak, 2025.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana fungsi pemerintah Desa dalam pemberdayaan Masyarakat adat di Desa Botuh Bosi Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian ini adalah Desa Botuh Bosi, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang. Subjek penelitian ini adalah Kepala Desa Botuh Bosi, Kepala Adat Desa Botuh Bosi serta Masyarakat adat botuh bosi. Penelitian ini menggunakan teori pemberdayaan masyarakat menurut Sunyoto Usman dimana indikator yang digunakan untuk melakukan penelitian ini yaitu, Kesejahteraan, Akses, Partisipasi dan Kontrol. Hasil penelitian ini menunjukan masih ada beberapa indikator yang belum maksimal pelaksanaannya. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disarankan Pemerintah Desa Botuh Bosi untuk memperkuat peran fasilitatornya dengan membangun komunikasi yang terbuka dan dua arah, memperjelas mekanisme pelibatan masyarakat adat dalam setiap tahapan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan situs Keramat Botuh Bosi, Pemerintah Desa Botuh Bosi perlu meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat adat dengan memastikan keterlibatan yang lebih inklusif, tidak hanya terbatas pada tokoh adat, tetapi juga melibatkan pemuda, perempuan, dan warga sekitar situs Keramat Botuh Bosi serta memperkuat kontrol masyarakat adat secara kelembagaan melalui penerbitan peraturan desa atau dokumen hukum yang mengakui kewenangan adat dalam pengelolaan situs Keramat Botuh Bosi

Kata Kunci : Fungsi Pemerintah Desa, Pemberdayaan Masyarakat

ABSTRACT

Stevania Samonta, E1031201046: The Function of Village Government in Empowering Indigenous Communities in Botuh Bosi Village, Simpang Hulu Sub-District, Ketapang Regency. Undergraduate Thesis, Government Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University, Pontianak, 2025.

The aim of this research is to determine the role of the Village Government in empowering the indigenous people in Botuh Bosi Village, Simpang Hulu Sub-District, Ketapang Regency. The research used a qualitative approach and a descriptive method. The data were collected using interviews and documentation. The research site was Botuh Bosi Village, Simpang Hulu Sub-District, Ketapang Regency. The subjects of this research were the Head of Botuh Bosi Village, the Customary Leader of Botuh Bosi Village, and the indigenous community of Botuh Bosi. This research used the theory of community empowerment proposed by Sunyoto Usman, with the indicators of welfare, access, participation, and control. The findings indicate that not all indicators are fully implemented. On the basis of these findings, it is recommended that the Botuh Bosi Village Government should enhance its facilitator role by establishing open two-way communication and explain the mechanisms of engaging the indigenous community in all development processes, especially in the management of the Botuh Bosi sacred site. Moreover, the Village Government should also improve the quality of the indigenous community involvement by making it more inclusive, not only of the traditional leaders but also of the youth, women, and residents surrounding the sacred site. Finally, it should enhance institutional control of the indigenous community by issuing village regulations or legal documents that acknowledge customary authority in the management of the Botuh Bosi sacred site.

***Keywords**: Village Government Function, Community Empowerment*

RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul "Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Adat di Desa Botuh Bosi Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang". Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana fungsi pemerintah Desa dalam pemberdayaan Masyarakat adat di Desa Botuh Bosi Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang. Penelitian ini dilakukan karena melihat adanya beberapa masalah yang ada seperti, Pemerintah desa masih kurang dalam menerapkan program pemberdayaan yang berfokus pada masyarakat ada, sehingga potensi local dan kearifan budaya belum berkembang secara maksimal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana fungsi pemerintah Desa dalam pemberdayaan Masyarakat adat di Desa Botuh Bosi Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang, dilihat dari 4 aspek menurut Sedarmayanti (2003) yaitu (1) Partisipasi, (2) Supresi Hukum, (3) Transparansi, (4) Responsivitas.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu peneliti ingin mengungkapkan hasil penelitian dengan menggambarkan masalah yang terjadi dengan penjelasan melalui kata-kata sederhana. Peneliti juga menampilkan hasil penelitian dengan sistematis, faktual dan akurat mengenai hubungan antara indikator dengan fakta, kata-kata dan gambar-gambar di lapangan bukti peneliti melakukan penelitian. Kemudian peneliti merumuskan kembali hasil penelitian yang diperoleh hingga menghasilkan kesimpulan hasil penelitian dari peneliti yang dilakukan di Desa Botuh Bosi**.** Namun demikian hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Fungsi pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat adat di Desa Botuh Bosi telah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan, meskipun

masih menghadapi beberapa tantangan. Pemerintah desa menjalankan perannya sebagai fasilitator dengan membuka ruang partisipasi bagi masyarakat adat, khususnya dalam pengelolaan situs Keramat Botuh Bosi dan pengembangan potensi wisata budaya. Fungsi ini mencerminkan kesadaran pemerintah desa dalam mendukung pelestarian nilai-nilai lokal dan penguatan identitas budaya masyarakat. Namun demikian, pemberdayaan yang dilakukan belum sepenuhnya merata dan berkelanjutan. Secara kelembagaan, keterlibatan masyarakat adat masih bersifat elitis dan terbatas pada tokoh tertentu, sementara pelibatan kelompok rentan seperti perempuan dan pemuda belum maksimal. Selain itu, kontrol masyarakat adat terhadap situs keramat belum diakui secara hukum melalui regulasi desa, sehingga posisinya masih rentan terhadap intervensi dari pihak luar. Penguatan kapasitas ekonomi masyarakat adat juga masih minim, sehingga potensi budaya yang ada belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan mereka.

Penelitian ini menyarankan Pemerintah Desa Botuh Bosi untuk memperkuat peran fasilitatornya dengan membangun komunikasi yang terbuka dan dua arah, memperjelas mekanisme pelibatan masyarakat adat dalam setiap tahapan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan situs Keramat Botuh Bosi, Pemerintah Desa Botuh Bosi perlu meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat adat dengan memastikan keterlibatan yang lebih inklusif, tidak hanya terbatas pada tokoh adat, serta memperkuat kontrol masyarakat adat secara kelembagaan melalui penerbitan peraturan desa atau dokumen hukum yang mengakui kewenangan adat dalam pengelolaan situs Keramat Botuh Bosi

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa	: Stevania Samonta
Nomor Induk Mahasiswa	: E1031201046
Program Studi	: Ilmu Pemerinatahan

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya dalam Skripsi ini tidak terdapat atau pendapat yang pernah ditulis atu ditertibkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka

Pontianak,
Yang membuat pernyataan



Samonta
NIM.E1031201046

Dipindai dengan CamScanner

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Hidup Bukan Saling Mendahului, Bermimpilah Sendiri-Sendiri"

(Hindia)

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

1. Kedua orang tua saya bapak **Mateus Tagon** dan ibu **Maria Yustina** yang sangat saya cintai. Terimakasih untuk cinta kasih, doa dan dukungan yang sudah diberikan selama ini. Dukungan dengan terus memberikan Doa Motivasi dan Semangat, serta materi dalam memenuhi kebutuhan studi saya. Terimakasih sudah mengupayakan usaha terbaik dalam mendukung studi saya hingga saya dapat meraih gelar sarjana.
2. Saudara saya **Inde Desiri palungan** dan **Firmus Tidar** serta Keponakan saya **Gabriel Arvhie Tidar**. Terima kasih untuk semangat dan menjadi penyemangat selama proses skripsi yang panjang ini.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga atas berkat dan rahmat-Nya peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul "Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Adat Di Desa Botuh Bosi Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang" dengan baik. Skripsi ini diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Tanjungpura Pontianak.

Peneliti menyadari bahwa dalam Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berperan besar dalam penyusunan dan penyelesaian skrispi ini. Peneliti mengucapkan terimakasih kepada :

1. Dr. Herlan, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.
2. Bima Sujendra S.IP, M.Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura. Dan selaku dosen pembimbing pendamping.
3. Dr. Pardi, M.AB selaku dosen pembimbing utama yang telah memberikan arahan, bimbingan terbaik, serta motivasi selama bimbingan skripsi ini berlangsung
4. Dr. Yulius Yohanes, M.Si selaku dosen pembahas utama yang telah memberikan arahan dan masukan.

5. Rasidar, SE, M.Si selaku pembahas kedua yang telah memberikan masukan serta arahan.
6. Segenap staf pengajar dan administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah memberikan ilmu dan membantu administrasi untuk kelancaran selama masa studi dan penyusunan Skripsi ini.
7. Terimakasih kepada Desa Botuh Bosi, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang yang menjadi lokasi penelitian, terimakasih atas informasi dan dukungan yang sangat berharga bagi peneliti.
8. Teman Dekat saya, Rino Royanldo
9. Kerabat Mahasiswa Katolik FISIP UNTAN Angkatan 2020 (KEMAS 2020), terimakasih atas semua cerita dan kenangan semasa kita menempuh perkuliahan ini dan sukses dimanapun kalian berada.
10. Kepada Keluarga Besar saya dimanapun mereka berada.

Peneliti berharap bahwa Skripsi ini dapat menambah wawasan serta memberi manfaat bagi pembaca. Peneliti juga menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu peneliti mengharapkan kritik dan saran dari pembaca agar dapat menjadi lebih baik di kemudian hari.

Pontianak, 22 September 2025

Stevania Samonta
E1031201046

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN i
ABSTRAK ii
RINGKASAN SKRIPSI iv
PERNYATAAN KEASLIAN vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN vii
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI x
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang Masalah 1
1.2. Identifikasi Masalah 7
1.3. Fokus Penelitian 7
1.4. Rumusan Masalah 7
1.5. Tujuan Penelitian 8
1.6. Manfaat Penelitian 8
1.6.1. Manfaat Teoritis 8
1.6.2. Manfaat Praktis 8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 10
2.1. Desa 10
2.2. Pemerintah Desa 11
2.2.1. Tugas Dan Fungsi Pemerintah Desa 15
2.3. Masyarakat Adat 20
2.4. Teori Good Governance 23
2.5. Hasil Penelitian yang Relevan 31
2.6. Alur Pikir Penelitian 36
2.7. Pertanyaan Penelitian 40
BAB III METODE PENELITIAN 41
3.1. Jenis Penelitian 41
3.2. Langkah-Langkah Penelitian 42
3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian 43

3.3.1. Lokasi Penelitian 43
3.3.2. Waktu Penelitian 44
3.4. Subjek dan Objek penelitian 45
3.4.1. Subjek Penelitian 45
3.4.2. Objek penelitian 46
3.5. Teknik Pengumpulan Data 46
3.6. Alat Pengumpulan Data 52
3.7. Analisis Data 53
3.7.1. Keabsahan data 55
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 58
4.1 Kabupaten Ketapang 58
4.1.1 Letak Geografis 58
4.1.2 Kondisi Sosial Budaya Ekonomi Kabupaten Ketapang 60
4.2 Kecamatan Simpang Hulu 61
4.2.1 Kondisi Sosial Budaya Ekonomi Simpang Hulu 64
4.3 Desa Botuh Bosi 65
4.3.1 Kondisi Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat Desa Botuh Bosi 68
BAB V HASIL PENELITIAN 69
5.1. Hasil Penelitian 69
5.2 Analisis Data 76
5.2.1 Partisipasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat Adat Desa Botuh Bosi 76
5.2.2 Supresi Hukum Dalam Pemberdayaan Masyarakat Adat Desa Botuh Bosi 79
5.2.3 Transparansi Dalam Pemberdayaan Masyarakat Adat Desa Botuh Bosi 84
5.2.4 Responsivitas Dalam Pemberdayaan Masyarakat Adat Desa Botuh Bosi 89
BAB VI PENUTUP 92
6.1 Kesimpulan 92

6.1.1 Partisipasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat Adat Desa Botuh 93
6.1.2 Supresi Hukum Dalam Pemberdayaan Masyarakat Adat Desa Botuh Bosi……..94
6.1.3 Transparansi Dalam Pemberdayaan Masyarakat Adat Desa Botuh Bosi.....95
10.1.4 ..... Responsivitas Dalam Pemberdayaan Masyarakat Adat Desa Botuh Bosi 96
6.2 Saran.....97
6.2.1 Partisipasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat Adat Desa Botuh Bosi.....98
6.2.2 Supresi Hukum Dalam Pemberdayaan Masyarakat Adat Desa Botuh Bosi ……98
6.2.3 Transparansi Dalam Pemberdayaan Masyarakat Adat Desa Botuh Bosi.....98
6.2.4 Responsivitas Dalam Pemberdayaan Masyarakat Adat Botuh Bosi99
6.3 Keterbatasan Penelitian 99
DAFTAR PUSTAKA.....106
LAMPIRAN.....109

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan luas 1.904.569 km2, dan total penduduknya mencapai 270.203.917 menurut sensus penduduk tahun 2020. Masyarakat Indonesia tidak hanya menetap di kota melainkan sekitar 70% masyarakat Indonesia hidup di Daerah Pedesaan, dengan ini titik sentral pembangunan masyarakat Indonesia di daerah Pedesaan. Keberadaan Pemerintahan Desa juga menurunkan keberhasilan Pemerintahan dalam hal pembangunan baik itu dari tingkat daerah maupun pusat yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Sehingga dalam hal ini suatu Desa sangat menentukan kemajuan Negara.

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum dengan penyelengaraan rumah tangga berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui oleh pemerintahan pusat dan berkendudukan di dalam wilayah kabupaten daerah yang diakui oleh Negara Keatuan Republik Indonesia (NKRI), desa juga bertanggungjawab untuk bertanggungjawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga dalam hal peningkatan kesejahteraan, pemerintahan melakukan upaya dengan membuat suatu kebijakan yang mengarah pada pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan Dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan social untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga pada

dasarnya merupakan proses untuk membuat masyarakat menjadi berdaya. Setiap anggota masyarakat dalam sebuah komunitas sebenarnya memiliki potensi, gagasan serta kemampuan untuk membawa dirinya dan komunitasnya untuk menuju kearah yang lebih baik, namun potensi itu terkadang tidak bisa berkembang disebabkan beberapa factor-faktor tertentu. Untuk menggerakan kembali kemandirian masyarakat dalam pembangunan dikomunitasnya, maka diperlukan dorongan-dorongan atau gagasan awal untuk menyadarkan kembali peran dan posisinya dalam kerangka untuk membangun masyarakat yang Sejahtera. (Anwas 2013:4).

Desa merupakan wilayah yang sangat memerlukan pembangunan dan pengembangan khususnya basis ekonomi. Pembangunan ini merupakan suatu usaha untuk mengurangi berbagai kesejahteraan baik itu pendapatan, kesenjangan kaya dan miskin, maupun kesenjangan antara desa dan Kota. Disamping itu, pembangunan pedesaan di pandang juga sebagai suatu program pembangunan yang dilakukan secara berencana atau meningkatkan produksi, pendapatan, dan kesejahteraan dalam arti peningkatan kualitas hidup di bidang pendidikan, kesehatan maupun perumahan (Rani, 2018 : 15-16).

Masyarakat Adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, mentap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri dan memiliki kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dimna para anggota masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorangpun diantara anggota itu mempunyai pikiran atau 21 kecendrungan untuk membubarkan ikatanyang telah

tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepas diri dari ikatan itu untuk selama- lamanya. (Muazin 2014:3).

Desa dan Adat mendapat pengaturan secara kompresif dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa menjelaskan bahwa Desa adalah Desa dan Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pengakuan terhadap Desa juga tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024).

Desa memiliki identitas, tradisi atau pranata sosial dan kelengkapan budaya asli serta merupakan sebuah sistem sosial yang kemudian berkembang menjadi pemerintahan yang demokratis, dan pada masanya memiliki otonomi Desa dalam mengatur kehidupannya sendiri. Kebijakan–kebijakan yang ada di Desa diatur dalam pemerintahan Desa yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa, pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara. Pemerintahan Desa merupakan pelaksana dari otonomi Desa, dengan adanya otonomi Desa

pemerintah Desa mempunyai wewenang untuk menjalankan otonomi Desa dengan penuh termasuk melakukan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan masyarakat, dengan atau tanpa dukungan pihak luar, untuk memperbaiki kehidupannya yang berbasis pada daya mereka sendiri.(Mardikanto, 2015:100).

Kewenangan pemerintah Desa dalam pengembangan pemberdayaan masyarakat desa dilakukan dengan cara pembinaan dan pengawasan terhadap adat istiadat masyarakat, agar tetap terjaga kelestariannya. Adat yang terjaga kelestariannya akan menjadi ciri khas masyarakat dan menjadi kebanggan masyarakat desa yang berhasil secara terus menurus melestarikan hingga keanak cucu cicit kelak. Adat istiadat perlu dijaga dan dilestarikan karena Adat istiadat perlu dijaga karena memiliki peran penting dalam membentuk identitas suatu daerah atau suku. Adat istiadat juga menyimpan nilai-nilai budaya yang harus dijaga agar tidak hilang. Sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap leluhur. Adat Istiadat yang unik membuat Indonesia dikenal dengan negara yang kaya akan adat dan tradisi.

Salah satu daerah yang memiliki keunikan tradisi (adat) di Desa Botuh Bosi, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Dengan masyarakat yang masih kental dengan adat istiadat yang masih dijaga kelestariannya hingga saat ini. Desa Botuh Bosi merupakan suatu wilayah yang di tetapkan salah satu Kumpulan masyarakat Adat Dayak Kualan't. Salah satu bukti kuat masyarakat Adat di Desa Botuh Bosi adanya

Keramat Botuh Bosi peninggalan leluhur yang sampai sekarang masih digunakan masyarakat untuk memberikan penghormatan, permohonan dan ritual Adat terhadap luluhur-leluhur Dayak Kualan't.

Keramat Botuh Bosi itu sendiri berarti Batu dan Besi jika dimaknai dengan ritual- ritual Adat berfungsi untuk melindungi dan menjaga Masyarakat yang tinggal dan menetap di sekitaran Keramat Botuh Bosi itu sendiri yang masuk ke wilayah Desa Botuh Bosi Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang. Di Keramat Botuh Bosi setiap tahunnya di laksakan ritual-ritual Adat Masyarakat yaitu :

1. *"Papak Buah"* dilaksanakan saat musim buah akan tiba.
2. *"Mulang Buah"* dilaksanakan saat musim buah sudah selesai.
3. *"Bata Tulah"* dilaksanakan setiap satu tahun sekali saat musim Berladang akan mulai.
4. *"Molas Angko"* dilaksanakan saat musim panen selesai atau musim berladang sudah selesai.

Keramat Botuh Bosi lahir dan muncul di Tengah-tengah Masyarakat tradisional suku Dayak Kualan't yang belum mengenal agama dan masih menganut Adat yang sangat kuat dan terus menerus berkembang hingga di Tengah-tengah Masyarakat yang semakin modern, satu sisi Masyarakat modern membentuk paradigma tentang hidup yang lebih modern dan akibatnya ajaran leluhur melalui tradisi mulai luntur. Pandangan tentang ketinggalan zaman lebih mendominasi ketimbang keyakinan atas majunya kebudayaan karena menghargai apa yang telah di capai oleh leluhur di masa lampau yang wajib di

lestarikan.

Kurangnya optimalisasi peran pemerintah desa dalam menjalankan fungsi pemberdayaan terhadap masyarakat adat di Desa Botuh Bosi Pemerintah Desa dalam bentuk pemberdayaan bahwa masih kurang diterapkan terhadap Masyarakat Adat seperti kurang memberikan pengetahuan oleh tokoh Adat kepada Masyarakat Desa Botuh Bosi terutama generasi muda, Pemerintah Desa masih kurang memperhatikan Pembangunan di sekitaran Keramat Botuh Bosi, masih kurang sosialisasi tentang partisipasi dalam setiap acara Adat kepada Masyarakat Desa Botuh Bosi terutama generasi mudanya serta kurangnya sinergi antara pemerintahan desa dan masyarakat adat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan pelestarian budaya. Dari permasalahan yang ada bahwa perlu dibenahi Kembali untuk mengembangan suatu adat atau budaya untuk tiada tergerus hangus oleh modernisasi zaman pada masa sekarang ini. Melalui penelitian ini, penulis ingin menelaah sejauh mana fungsi pemerintah desa di Desa Botuh Bosi dalam melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat adat**,** baik dari segi kebijakan, praktik, maupun dampaknya terhadap keberdayaan masyarakat. Penelitian ini juga berupaya melihat apakah fungsi-fungsi tersebut telah berjalan optimal atau masih terdapat hambatan-hambatan struktural maupun kultural yang perlu diidentifikasi dan dicari solusinya.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan rencana penelitian dengan judul **"Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Adat Di Desa Botuh Bosi Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang"**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti mengidentifikasikan masalah yang akan dijadikan bahan penelitian selanjutnya.

1. Pemerintah desa masih kurang dalam menerapkan program pemberdayaan yang berfokus pada masyarakat adat, sehingga potensi lokal dan kearifan budaya belum berkembang secara maksimal.
2. Kurangnya perhatian dari pemerintah desa terhadap infrastruktur di sekitar situs sakral Keramat Botuh Bosi.

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah penelitian dan agar penelitian yang dilakukan tidak menyimpang dan terlalu luas maka peneliti memfokuskan pada permasalahan bagaimana fungsi pemerintah Desa dalam pemberdayan Masyarakat Adat di Desa Botuh Bosi Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan dalam penjelasan di dalam latar belakang masalah penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : “Bagaimana fungsi pemerintah Desa dalam pemberdayaan Masyarakat adat di Desa Botuh Bosi Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang?”

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penelitian dalam penelitian ini yaitu :

1. Ingin mengetahui bagaimana fungsi pemerintah Desa dalam pemberdayaan terhadap Masyarakat Adat Desa Botuh Bosi Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang melakukan perannya dalam kegiatan pemberdayaan yang diimplementasikan kepada Masyarakat Adat di Desa Botuh Bosi.

1.6 Manfaat Penelitian

Peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang telah membaca dan terlibat dalam penelitian ini, Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1.6.1 Manfaat Teoritis

Untuk dapat menambah ilmu pengetahuan, pengalaman dan wawasan serta bahan dalam penerapan ilmu metode penelitian, khususnya dalam bidang Ilmu Pemerintahan yang berkaitan dengan Gambaran fungsi pemerintah Desa dalam pemberdayaan Masyarakat Adat di Desa Botuh Bosi Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Masyarakat hasil penelitian ini dapat di jadikan acuan dalam memberikan masukan bagi pemerintah agar memperhatikan keberadaan Masyarakat Adat.
2. Bagi Pemerintah hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan

sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi kinerja khususnya dalam bidang pemberdayaan terhadap Masyarakat Adat di Desa Botuh Bosi.

3. Bagi penulis hasil ini dapat dijadikan pengalaman berkaitan dengan bentuk- bentuk pemberdayaan yang diimplementasikan oleh pemerintah Desa kepada Masyarakat.